

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Program beras miskin (RASKIN) merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang didasarkan pada prinsip penghormatan, penghargaan dan pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat miskin. Namun dalam praktek kehidupan sehari-hari ternyata masih banyak masalah yang menghadang program pemerintah ini. Misalnya alokasi beras yang disediakan pemerintah tidak mencukupi kebutuhan masyarakat miskin, terbatasnya alokasi menyebabkan belum tercapainya jumlah beras yang direkomendasikan, akurasi data keluarga miskin tiap daerah perlu diperbaiki serta kelembagaan tingkat paling bawah yang menjamin ketetapan sasaran program (Munthe, 2009).

Kelurahan merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan dan kelembagaan negara yang memiliki tugas dan peran yang berkaitan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik. Pelayanan publik yang dilakukan oleh kelurahan Oebufu secara langsung adalah pelayanan dalam hal penyaluran raskin. Kelurahan Oebufu memiliki jumlah KK miskin sebanyak 300 orang yang terdata dari tiap-tiap RT dan yang layak menerima raskin ada 40 KK namun pada prakteknya penyaluran raskin yang dilakukan oleh kelurahan Oebufu masih mengalami kendala, yaitu ketua RT masih subjektif dalam menentukan kepala keluarga (KK) yang berhak atau tidaknya menerima raskin. Penentuan kriteria penerimaan raskin yang sudah ada tidak mengacu pada kriteria-kriteria keluarga

miskin atau kriteria yang sudah ditentukan oleh kelurahan itu sendiri. Hal ini menyebabkan penyaluran beras raskin ini tidak tepat sasaran. Dari permasalahan ini sistem pendukung keputusan (SPK) sangat diperlukan dalam mengatasi masalah yang ada, sehingga penyaluran beras raskin tepat pada sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kelurahan Oebufu.

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis dapat merumuskan masalah yaitu penyaluran raskin tidak mengacu pada kriteria keluarga miskin sehingga menyebabkan penyaluran beras raskin yang tidak tepat sasaran.

### **1.3 Batasan Masalah**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah :

1. Raskin pada kelurahan Oebufu
2. Kriteria yang digunakan dalam pembagian raskin adalah penghasilan/bulan, kondisi tempat tinggal, tanggungan dalam keluarga dan penerima manfaat sebelumnya.
3. Metode yang digunakan dalam analisa SPK adalah metode Analytical Hierarchy Process (AHP)
4. Dalam proses penginputan data dari 300 KK miskin untuk menyaring data yang dimaksimalkan sebanyak 40 KK yang layak menerima RASKIN sebanyak 10 kali.

## **1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu mengembangkan SPK dengan metode AHP untuk membantu aparat kelurahan Oebufu untuk menentukan penerimaan raskin dengan lebih objektif.

### **1.4.2 Manfaat**

Perancangan “sistem pendukung keputusan penerimaan raskin pada kantor kelurahan Oebufu ini diharapkan dapat membantu pegawai kelurahan khususnya pada Bidang KESOS dalam hal pengambilan keputusan untuk berhak atau tidaknya keluarga menerima raskin.